

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam realitasnya, distribusi pembangunan di seluruh wilayah negara tidak selalu merata. Beberapa daerah mampu mencapai kemajuan yang signifikan, sementara daerah lain mengalami perkembangan yang lambat dan bahkan tertinggal. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman di setiap daerahnya, dimana setiap daerah memiliki potensi yang berbeda tidak heran pasti akan ditemukan banyak permasalahan dalam proses pembangunannya (Marihhot, 2020).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah bisa terjadi baik secara horizontal yaitu berupa perbedaan antara perdesaan dan perkotaan daerah pedalaman dan perbatasan, serta secara vertikal yaitu berupa perbedaan distribusi pendapatan antar komunitas. Mengurangi ketimpangan dalam pembangunan daerah merupakan upaya jangka panjang yang dampaknya tidak dapat langsung dinikmati dalam jangka pendek, namun kesenjangan pembangunan yang belum terselesaikan antar daerah akan menjadi permasalahan yang serius dan dapat menimbulkan permasalahan keadilan (Prastowo, 2014). Salah satu permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan di Indonesia adalah ketimpangan wilayah atau kesenjangan pembangunan antar wilayah. Di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar dan kawasan industri, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

infrastruktur berlangsung dengan cepat, didukung oleh investasi yang besar, akses ke teknologi, serta ketersediaan sumber daya manusia yang terampil. Namun, di sisi lain, banyak daerah perdesaan dan wilayah pedalaman yang masih tertinggal, dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat dan keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kesenjangan ini menciptakan disparitas signifikan dalam kualitas hidup penduduk, menghambat pembangunan nasional yang merata, dan memerlukan intervensi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati manfaat dari perkembangan ekonomi dan sosial secara adil (BPS, 2022).

Saat ini, Indonesia terdiri dari 7 pulau dan 38 provinsi, dengan setiap wilayahnya memiliki potensi alam dan teknologi yang beragam. Perbedaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan sumber daya alam di antara provinsi-provinsi tersebut merupakan penyebab utama ketimpangan pembangunan. Kegiatan ekonomi yang dominan di provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam telah menciptakan disparitas yang signifikan. Meskipun kekayaan alam seharusnya menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi dan menyebarkan manfaatnya, tidak semua wilayah memiliki kekayaan alam yang sama, sehingga menghasilkan ketimpangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius (Ridho, 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang dapat menarik investor, yang dapat berdampak munculnya ketimpangan pembangunan. Peran pemerintah memiliki signifikansi penting dalam mengatur ekonomi yang akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang tidak memiliki daya tarik investasi alamiah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan. Peran pemerintah dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu alokasi, distribusi, stabilisasi, dan dinamisasi. Ini bisa tercermin dalam kebijakan fiskal yang berbeda-beda di setiap daerah, yang kemudian dapat menyebabkan disparitas pembangunan yang memengaruhi pendapatan daerah yang tercermin dalam PDRB lokal.

Halim (2001) dan Todaro (2003) menyoroti pentingnya pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana secara optimal antara belanja aparatur dan belanja publik. Halim menekankan bahwa semakin tinggi persentase belanja aparatur, semakin sedikit investasi yang tersedia untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat, dan sebaliknya. Todaro juga menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi disparitas dan ketimpangan, dengan menyarankan alokasi anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, baik melalui pembayaran transfer langsung maupun melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan lainnya. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur publik akan berdampak langsung pada disparitas pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, keberhasilan pembangunan tidak lepas dari peran pemerintah dalam upaya menentukan arah belanja pengeluaran pemerintah dan investasi pembangunan, upaya peningkatan pendapatan daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan perkembangan. Salah satu bentuk peran langsung pemerintah adalah melalui intervensi anggaran

pemerintah dalam hal ini mengalokasikan sumber daya ekonomi berupa barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam kebijakan dan perencanaan serta pengarusutamaan anggaran terkait pembangunan, program dan kegiatan pengurangan kesenjangan sangatlah penting. Sejauh ini, berbagai pemerintahan upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, baik langsung maupun tidak langsung, berupa kerangka peraturan dan kerangka anggaran diharapkan berdampak pada kemajuan daerah perekonomian yang pada akhirnya menciptakan peningkatan pembangunan di daerah (Hartai, 2021).

Untuk memberikan gambaran umum belanja pemerintah, baik belanja langsung maupun tidak langsung serta pembiayaan daerah yang juga merupakan gambaran kemampuan keuangan pemerintah provinsi Jambi dalam membiayai proses pembangunannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 Belanja Pemerintah Provinsi Jambi berikut ini:

Tabel 1.1 Belanja Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Jenis Belanja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Tidak Langsung	2.405.995	2.933.832	2.986.488	3.075.441	2.651.821
1. Belanja Pegawai	1.238.025	1.382.612	1.333.397	1.500.168	1.510.158
2. Belanja Bunga	0	0	0	0	0
3. Belanja Subsidi	500	500	550	550	1.221
4. Belanja Hibah	457.360	672.272	768.603	777.720	191.244
5. Belanja B. Sosial	118	283	328	26.328	17.070
6. Belanja bagi hasil	579.768	710.641	631.105	717.538	768.618
7. Belanja B. Keuangan	100.127	167.431	99.800	93.720	156.600
8. Belanja Tidak Terduga	97	91	152.703	51.908	6.910
Belanja Langsung	1.792.260	1.890.533	1.443.904	1.220.364	2.120.864
1. Belanja Pegawai	175.881	187.168	194.992	-	-
2. Belanja Barang & Jasa	831.655	836.864	606.215	770.674	1.214.067
3. Belanja Modal	784.724	866.500	642.696	449.690	906.797
Pembiayaan Daerah	671.281	420.323	390.555	727.979	-
Jumlah	4.869.536	5.244.689	4.820.947	5.116.279	4.772.689

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi 2018-2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa belanja pemerintah provinsi Jambi sepanjang tahun 2018 hingga 2022 mencerminkan dinamika ekonomi yang beragam dan berfluktuatif. Pada tahun 2018, total belanja pemerintah provinsi Jambi sebesar Rp. 4.869.536 juta, dengan komponen belanja tidak langsung memiliki kontribusi terbesar, terutama pada belanja pegawai sebesar Rp. 1.238.025 juta. Sedangkan belanja langsung mencapai Rp. 1.792.260 juta, dengan kontribusi terbesar pada belanja barang dan jasa sebesar Rp. 831.665 juta. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan dimana total realisasi belanja pemerintah sebesar Rp.5.244.689 juta rupiah masih sama pada tahun sebelumnya belanja pemerintah didominasi oleh komponen belanja tidak langsung yakni sebesar Rp. 1.871.835 juta rupiah dengan kontribusi terbesar pada belanja pegawai sebesar Rp.1.382.612 juta rupiah sedangkan belanja langsung sebesar Rp.1.890.533 juta rupiah dengan kontribusi terbesar pada belanja modal Rp. 866.500 juta rupiah.

Pada tahun 2020 belanja pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp.423.742 juta rupiah sehingga pada tahun tersebut belanja pemerintah tercatat sebesar Rp.4.820.947 juta rupiah. Dengan kontribusi komponen yang masih sama pada tahun sebelumnya walau nilai dari komponen belanja cukup berbeda. Selanjutnya pada tahun 2021 realisasi belanja pemerintah Provinsi Jambi meningkat tercatat sebesar Rp. 5.116.279 juta rupiah didominasi oleh komponen belanja tidak langsung yakni sebesar Rp.3.075.441 juta rupiah dengan kontribusi terbesar pada belanja pegawai sebesar Rp.1.500.168 juta rupiah sedangkan belanja langsung sebesar Rp.1.220.364 juta rupiah dengan kontribusi terbesar pada belanja barang dan jasa sebesar Rp.770.674 juta rupiah. Pada tahun 2022 belanja

pemerintah mengalami penurunan, belanja pemerintah tercatat sebesar Rp. 4.772.689 juta rupiah dimana komponen belanja tidak langsung masih memiliki kontribusi terbesar terutama pada belanja pegawai sebesar Rp.1.510.158 juta rupiah angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 2.120.864 juta rupiah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya begitu pula dengan kontribusi terbesar pada belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.214.067 juta rupiah juga mengalami kenaikan.

Secara umum, struktur belanja pemerintah Provinsi Jambi, baik realisasi tahun 2018 maupun tahun 2022 tidak banyak berbeda. Walaupun nilai dari komponen belanja cukup berbeda, akan tetapi belanja tidak langsung masih tetap menjadi komponen dengan kontribusi paling besar. Sebaliknya, belanja tidak terduga memiliki nilai dan kontribusi yang paling kecil belanja daerah terhadap total pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi pada realisasi tahun 2021 dan tahun 2022.

Selain belanja pemerintah, pendapatan juga memainkan peran sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki pendapatan yang tinggi, daerah tersebut pasti akan mendapatkan perhatian dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan. Penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah, karena pendapatan ini berasal dari potensi lokal dan daerah memiliki kewenangan penuh dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Berikut adalah tabel 1.2 yang menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi.

**Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jambi
Berdasarkan Sumber Pendapatan Tahun 2018 - 2022 (Juta Rupiah)**

Sumber PAD	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Daerah	508.298	504.581	459.144	1.558.105	1.871.835
Restribusi Daerah	78.906	85.494	76.306	12.616	16.866
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	84.297	90.429	92.124	28.028	30.612
Lain-lain PAD yang Sah	582.643	575.143	576.162	244.680	244.271
Jumlah	1.254.144	1.255.581	1.203.636	1.433.185	2.163.585

Sumber: Survei Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi 2018-2022, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan angka yang cukup berfluktuatif. Dimana pada tahun 2018 PAD tercatat sebesar Rp.1.254.144 juta rupiah mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga PAD tercatat sebesar Rp.1.255.581 juta rupiah didukung oleh kenaikan beberapa komponen PAD yakni restribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang masing-masing sebesar Rp. 85.494 juta rupiah dan Rp. 90.429 juta rupiah. Pada tahun 2020 PAD mengalami penurunan hingga tercatat sebesar Rp.1.203.636 juta rupiah disebabkan penurunan beberapa komponen seperti restribusi daerah dan pajak daerah. Hal ini juga merupakan dampak dari adanya pandemi covid 19 yang melumpuhkan perekonomian dari segala sisi. Sejak tahun 2018 hingga 2020 kontribusi komponen terbesar PAD adalah lain-lain PAD yang sah yakni masing-masing sebesar Rp.582.643 juta rupiah, Rp.575.143 juta rupiah dan Rp.576.162 juta rupiah. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan PAD masing-masing tercatat sebesar Rp.1.834.431 juta rupiah dan Rp.2.163.585 juta rupiah yang didukung oleh peningkatan setiap komponen penyusun PAD kecuali

lain-lain PAD, dengan penyumbang kontribusi terbesar beralih pada pajak daerah yang masing-masing sebesar Rp.1.558.105 juta rupiah dan Rp. 1.871.835 juta rupiah. Secara keseluruhan PAD cenderung mengalami kenaikan yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan melalui alokasi pendapatan pada aspek pembangunan dan perbaikan struktur salah satunya belanja dalam menekan ketimpangan.

Bukan hanya PAD capaian investasi juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap munculnya ketimpangan pembangunan. Jhingan (2014) menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan dampak balik pada suatu wilayah, salah satunya adalah investasi. Ketimpangan wilayah dapat terjadi karena alokasi investasi yang terkonsentrasi di wilayah tertentu, sehingga distribusi investasi menjadi tidak merata. Investor cenderung memilih menanamkan modal mereka di wilayah yang memiliki fasilitas, infrastruktur jalan, dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang masih terbelakang.

Namun hal ini tergantung pada pemerataan bisa saja investasi justru menekan ketimpangan pembangunan jika PMDN dan PMA dapat tersebar merata khususnya lagi pada daerah-daerah terbelakang. Berikut gambaran investasi di Provinsi Jambi baik itu PMDN ataupun PMA dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3 Investasi di Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022 (Juta Rupiah)

Investasi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
PMA	101.872	54.570	26.967	50.857	39.202
PMDN	3.128.225	4.437.380	3.511.677	6.204.194	8.882.659
Jumlah	3.230.097	4.491.950	3.538.644	6.255.051	8.921.861

Sumber : Provinsi Jambi dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa investasi di Provinsi Jambi sepanjang tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 investasi tercatat sebesar Rp.3.230.097 juta rupiah dimana didominasi oleh PMDN sebesar Rp.3.128.225 juta rupiah dan PMA sebesar Rp.101.872 juta rupiah pada tahun 2019 terjadi kenaikan investasi sehingga tercatat sebesar Rp.4.491.950 juta rupiah yang masih didominasi oleh PMDN yakni sebesar Rp.4.437.380 juta rupiah. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan dimana investasi tercatat sebesar Rp.3.538.644 juta rupiah hal ini dikarenakan pada tahun 2020 merupakan puncak dari pandemi Covid 19 yang melumpuhkan banyak perekonomian di dunia tak terkecuali provinsi Jambi dimana pada tahun tersebut PMDN hanya sebesar Rp.3.511.677 juta rupiah dan PMA sebesar Rp.26.967 juta rupiah. Dan pada tahun 2021 dan 2022 investasi kembali bangkit dengan trend naik yang cukup tinggi yakni masing-masing sebesar Rp. 6.255.051 juta rupiah dan Rp.8.921.861 juta rupiah dimana peningkatan ini sejalan dengan peningkatan PMDN selain itu PMDN masih mendominasi investasi dengan angka meningkat yakni masing-masing sebesar Rp.6.204.194 juta rupiah dan Rp.8.882.659 juta rupiah berbeda dengan PMA pada tahun 2022 justru mengalami penurunan hingga tercatat sebesar Rp.39.202 juta rupiah. Seiring dengan peningkatan investasi terkhususnya pada PMDN secara teori mampu menurunkan ketimpangan pembangunan. Selain Investasi, Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi hal penting untuk diperhatikan dikarenakan Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat sebagai upaya menurunkan ketimpangan pembangunan yang ada pada

suatu daerah. Untuk melihat perkembangan indeks pembangunan manusia provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022

Komponen	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka harapan hidup saat lahir(AHH) (Tahun)	70,89	71,06	71,16	71,22	71,50
Harapan lama sekolah (HLS) (Tahun)	12,90	12,93	12,98	13,04	13,05
Rata-rata lama sekolah (RLS) (Tahun)	8,23	8,45	8,55	8,60	8,68
Pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp)	10.357	10.592	10.392	10.588	10.871
IPM	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Berdasarkan data tabel 1.4 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di provinsi Jambi periode 2018 hingga 2022 menunjukkan kenaikan angka yang signifikan setiap tahunnya, diikuti oleh kenaikan setiap komponen penilaiannya. Pada tahun 2018 IPM tercatat sebesar 70,65 pada tahun 2019 mengalami peningkatan sehingga tercatat sebesar 71,26 diikuti oleh kenaikan setiap komponen penilaiannya dimana AHH sebesar 71,06, HLS sebesar 12,93 RLS sebesar 8,45 dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebesar Rp.10.592. pada tahun 2020 komponen penilaian IPM mengalami peningkatan kecuali pengeluaran perkapita yang disesuaikan turun hingga tercatat sebesar Rp.10.392 salah satu penyebab perlambatan adalah merupakan dari dampak Covid 19 sehingga IPM mengalami perlambatan pertumbuhan yakni hanya tercatat sebesar 71,29. Pada tahun 2021 dan 2022 IPM kembali mengalami peningkatan dengan masing-masing tercatat sebesar 71,63 dan 72,14 didukung oleh peningkatan setiap komponen penilaian IPM. Dengan semakin baiknya Indeks Pembangunan

Manusia di Provinsi Jambi diharapkan mampu untuk semakin menekan angka ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan teori yang ada variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas, seperti belanja pemerintah beserta komponennya, pendapatan asli daerah, investasi beserta komponennya dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Namun apakah variabel tersebut mampu menekan ketimpangan pembangunan atau justru memperburuk ketimpangan pembangunan yang ada di provinsi Jambi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh lagi mengenai pengaruh dari variabel-variabel yang telah dijelaskan diatas khususnya belanja pemerintah dimana dalam penelitian ini menggunakan belanja langsung, pendapatan asli daerah, investasi yang dalam penelitian ini menggunakan PMDN dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi tingkat ketimpangan pembangunan provinsi Jambi periode tahun 2002-2022?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Langsung, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi periode tahun 2002-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi periode tahun 2002-2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Langsung, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi periode tahun 2002-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari gambaran tujuan penelitian yang telah disampaikan, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga, baik dalam konteks praktis maupun akademis. Berikut adalah beberapa manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini:

1. Manfaat Praktis

Harapannya, hasil penelitian ini bisa menyajikan informasi yang terperinci dan memberikan saran kepada seluruh masyarakat, terutama pemerintah, mengenai disparitas pembangunan di Provinsi Jambi. Diharapkan hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

2. Manfaat Akademis

- a. Berkontribusi pada pemahaman tentang analisis disparitas pembangunan di Provinsi Jambi.
- b. diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dalam ranah ilmu ekonomi, terutama dalam ekonomi pembangunan dan ekonomi regional.
- c. Dapat digunakan sebagai acuan dan sumber informasi bagi penelitian lanjutan dalam bidang tersebut.